



## UPAYA LOKALISASI PENCEGAHAN EKSTREMISME KEKERASAN YANG MENGARAH PADA TERORISME OLEH BNPT

Indah Pangestu Amaritasari <sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia

email: [indah.pangestu@dsn.ubharajaya.ac.id](mailto:indah.pangestu@dsn.ubharajaya.ac.id)

\*Penulis korespondensi

### Info Artikel:

Diterima 19 Mei 2024

Direvisi 25 Mei 2024

Disetujui 30 Juni 2024

Dipublikasikan 30 Juni 2024

**Abstract:** *Central policies in terms of preventing violent extremism need to be contextualized at the regional level so that they are effective and not counter-productive. Presidential Regulation No. 7 of 2021 concerning the National Action Plan for the Prevention and Suppression of Violent Extremism that Leads to Terrorism (RAN PE) is a policy from the center which then the regions are invited to implement it according to regional needs which are embodied in the form of a Regional Action Plan for the Prevention of Violent Extremism that Leads to Terrorism (RAD PE). There are principles in RAN PE that are then derived into RAD PE as well as new norms in the form of a whole-of-government and whole-of-society approach that the regions also adopt in developing regional level actions. Therefore, it is important to communicate between the center and the regions in terms of building a learning process so that the regions can develop appropriate policies and the central government can take lessons from the localization process that occurs to be developed into the next more effective policy.*

### Kata kunci:

Lokalisasi;

Pencegahan Ekstremisme;

Terorisme.

**Abstrak:** Kebijakan pusat dalam hal pencegahan ekstremisme kekerasan perlu dikontekskan ditingkat daerah sehingga efektif dan tidak menimbulkan kontra produktif. Peraturan Presiden No. 7 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) merupakan kebijakan dari pusat yang kemudian daerah dipersilakan untuk menerapkannya sesuai kebutuhan daerah yang diejawantahkan dalam bentuk Rencana Aksi Daerah Pencegahan Ekstremisme Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAD PE). Terdapat prinsip-prinsip dalam RAN PE yang kemudian diturunkan ke dalam RAD PE serta norma baru berupa *whole-of-government and whole-of-society approach* yang daerah juga adopsi dalam pengembangan aksi-aksi tingkat daerah. Oleh karena itu, penting komunikasi antara pusat dan daerah dalam hal membangun proses pembelajaran sehingga daerah dapat menyusun kebijakan yang tepat dan pemerintah pusat dapat mengambil pelajaran dari proses pelokalan yang terjadi untuk dikembangkan ke dalam kebijakan berikutnya yang lebih efektif.



© 2024 The Authors. Published by Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

## PENDAHULUAN

Ekstremisme kekerasan adalah bentuk ekstremisme yang mendorong, menggunakan, atau membenarkan kekerasan untuk mencapai tujuan ideologis, politik, atau sosial. Ini bisa melibatkan individu atau kelompok yang percaya bahwa tindakan kekerasan adalah cara yang sah untuk memperjuangkan pandangan atau aspirasi mereka, termasuk melalui terorisme, pemberontakan, atau serangan terhadap pihak yang dianggap sebagai lawan atau ancaman (Stephens et al., 2021). Beberapa cirinya yaitu (1) intoleransi terhadap pandangan yang berbeda dengan menggunakan kekerasan; (2) legitimasi kekerasan; (3) tujuan ideologis; (4) rekrutment dan radikalisasi; (5) pola yang terorganisir. Dalam upaya pencegahan ini maka, BNPT mmenginisiasi kebijakan berupa rencana aksi pencegahan dan penanggulangan ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme (RAN PE) yang kemudian melahirkan kebijakan pencegahan melalui produk hukum berupa Peraturan Presiden No. 7 tahun 2021. Kebijakan ini merupakan kebijakan yang urgen dimiliki Indonesia khususnya paska kejadian Bom Surabaya dan Mako Brimob (Amaritasari, 2018).

Kebijakan tingkat nasional ini menghadirkan norma baru dalam pencegahan ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme yaitu “*whole-of-government and whole-of-government*” sehingga di dalam kebijakan ini terdapat 48 Kementerian Lembaga yang terlibat dalam pencegahan dan mengakui pencegahan ekstremisme yang dilakukan oleh Organisasi Masyarakat (OMS) dengan menempatkan mereka ke dalam Pokja Tematis yang diakomodir dalam Perban BNPT No. 5 tahun 2021. RAN PE mengakomodir prinsip-prinsip penting dalam pencegahan ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme diantaranya yaitu HAM, pengarus utamaan gender, dan hak anak. Prinsip HAM dalam pencegahan ekstremisme ini penting seperti *do no harm* sehingga tidak menjadikan pencegahan ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme menjadi tidak kontra produktif.

Upaya pencegahan seperti ini penting untuk diterapkan di daerah dengan kebijakan daerah sehingga memerlukan upaya pelokalan upaya pencegahan ekstremisme kekerasan yang mengadopsi prinsip-prinsip yang ada di dalam RAN PE dan norma baru yang ada di dalamnya untuk pencegahan ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme.

## METODE

Metode dalam lokakarya pelokalan pencegahan ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme yang dilakukan oleh BNPT ini dilakukan secara partisipatoris. Kegiatan ini diselenggarakan oleh BNPT khususnya I-Khub yaitu platform knowledge mengenai ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme berkolaborasi dengan Sekretariat Bersama RAN PE (Sekber RAN PE) BNPT. Metode partisipatoris ini dilakukan dengan cara: (1) sharing pengalaman dari tingkat pusat dan upaya pelokalisaian yang dilakukan di daerah; (2) upaya pelokalan pencegahan ekstremisme kekerasan dengan cara mengidentifikasi persoalan yang ada di daerah tersebut kemudian mengidentifikasi aksi yang relevan untuk penguatan upaya pencegahan ekstremisme kekerasan. Hasil kegiatan ini adalah berupa rekomendasi

dari I-KHub BNPT<sup>1</sup> dan Sekber RAN PE<sup>2</sup> kepada daerah yang bersangkutan untuk upaya pencegahan ekstremisme kekerasan.

## ANALISIS SITUASI

Literatur yang ditinjau berfokus pada pencegahan ekstremisme kekerasan melalui pendidikan, pelibatan masyarakat, dan upaya pembangunan ketahanan (Stephens et al., 2021). Hal ini menekankan pentingnya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan identitas, mendorong dialog, dan mengeksplorasi nilai-nilai untuk melawan ekstremisme. Konsep ketahanan menjadi pusat dari diskusi-diskusi ini, dengan pergeseran ke arah perspektif sosial-ekologis untuk mencakup pengaruh masyarakat yang lebih luas dalam mencegah ekstremisme kekerasan.

Literatur menyarankan untuk mengarahkan kembali wacana tentang pencegahan ekstremisme melalui perspektif sosial-ekologis tentang ketahanan dengan mengalihkan fokus dari individu ke konteks sosial dan fisik yang lebih luas yang memungkinkan pertumbuhan positif dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Perspektif ini menekankan pentingnya mengatasi ketidakadilan sistemik dan peran institusi dalam menciptakan lingkungan di mana individu dan masyarakat dapat mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya dan kekuatan mereka. Dengan berfokus pada kualitas hubungan di dalam dan di antara komunitas dan institusi, pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi kerentanan terhadap radikalisme dan mendorong proses pengembangan identitas yang positif.

Kaitannya pencegahan dengan pelokalan dalam hal perspektif sosio-ekologikal adalah bahwa pendekatan ini menekankan pentingnya konteks sosial dan fisik dalam memungkinkan pertumbuhan positif dalam kondisi yang merugikan. Perspektif ini menggeser fokus dari individu sebagai pusat perubahan ke pentingnya lingkungan sosial dan fisik yang mendukung. Dengan demikian, pencegahan tidak hanya berfokus pada individu tetapi juga pada struktur kontekstual dan institusi yang dapat mengurangi kerentanan terhadap radikalisme dan mempromosikan perkembangan identitas yang positif.

Urgensi pelokalan pencegahan ekstremisme kekerasan di komunitas terletak pada beberapa faktor kunci yaitu (1) pendekatan top-down dan bottom-up; (2) sensitive terhadap konteks lokal; dan (3) membangun kemitraan yang transparan (Ellis & Abdi, 2017). Pertama, pendekatan "top-down" yang tradisional sering kali tidak efektif karena tidak memperhitungkan dinamika dan kebutuhan spesifik dari komunitas tersebut. Sebaliknya, pendekatan "bottom-up" yang melibatkan komunitas secara

---

<sup>1</sup> I-KHub BNPT adalah singkatan dari Indonesia Knowledge Hub yaitu platform digital yang menjadi wadah dan mekanisme antar Kementerian/Lembaga dalam mengimplementasikan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang mengarah pada Terorisme (RAN PE) dalam pelaksanaan koordinasi, pengawasan dan pelaporan secara akuntabel, transparan dan partisipatif. I-Khub BNPT dapat diakses pada <https://ikhub.id>

<sup>2</sup> Sekber RAN PE adalah Sekretaris Bersama RAN PE yang diketuai oleh Kepala BNPT dan beranggotakan kementerian berikut: (1) Kemendagri; (2) Kemenkopolkumham; (3) Kemenlu; (4) Kemenko PMK; (5) Kemen PPN/Bappenas; (6) BNPT. Hal ini mengacu kepada Perpres 7/2021 dan Perban BNPT No. 5 tahun 2021.

langsung dapat lebih efektif karena komunitas sering memainkan peran kritis dalam respons jangka pendek dan panjang terhadap ancaman.

Kemudian, pada upaya pencegahan yang tidak sensitif terhadap konteks lokal dapat memperburuk stigma dan diskriminasi terhadap kelompok tertentu, seperti komunitas Muslim, yang pada gilirannya dapat mengurangi ikatan sosial dan jembatan sosial yang esensial untuk proses resiliensi komunitas. Misalnya, identifikasi kebutuhan pencegahan ekstremisme kekerasan oleh entitas pemerintah tanpa melibatkan komunitas dapat mengurangi resiliensi komunitas itu sendiri. Ketiga, membangun kemitraan yang transparan dan autentik antara komunitas dan pemerintah adalah komponen kritis dalam membangun komunitas yang tangguh. Hal ini dapat dilakukan melalui penelitian partisipatif berbasis komunitas yang melibatkan pemimpin komunitas yang dihormati dan pemuda, sehingga dapat membangun kepercayaan dan respons yang lebih sesuai dengan kebutuhan komunitas. Dengan demikian, pelokalan pencegahan ekstremisme kekerasan di komunitas tidak hanya membantu dalam mengurangi risiko, tetapi juga memperkuat jaringan sosial dan identitas sosial yang penting untuk resiliensi komunitas.

Manfaat pelokalan pencegahan ekstremisme kekerasan meliputi beberapa aspek penting (Ellis & Abdi, 2017):

1. Efektivitas yang Lebih Tinggi: Pendekatan "bottom-up" yang melibatkan komunitas secara langsung sering kali lebih efektif karena memperhitungkan dinamika dan kebutuhan spesifik dari komunitas tersebut.
2. Mengurangi Stigma dan Diskriminasi: Upaya pencegahan yang sensitif terhadap konteks lokal dapat mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap kelompok tertentu, seperti komunitas Muslim, yang dapat memperkuat ikatan sosial dan jembatan sosial yang esensial untuk resiliensi komunitas.
3. Membangun Kepercayaan dan Kemitraan: Melalui penelitian partisipatif berbasis komunitas, kemitraan yang transparan dan autentik antara komunitas dan pemerintah dapat dibangun, yang penting untuk membangun komunitas yang tangguh.
4. Memperkuat Jaringan Sosial dan Identitas Sosial: Pelokalan pencegahan ekstremisme kekerasan dapat memperkuat jaringan sosial dan identitas sosial yang penting untuk resiliensi komunitas.

Dengan demikian, pelokalan pencegahan ekstremisme kekerasan tidak hanya membantu dalam mengurangi risiko, tetapi juga memperkuat struktur sosial yang mendukung resiliensi komunitas.

Dengan adanya RAN PE terlihat progress keberhasilan upaya pencegahan diantaranya dapat diidentifikasi melalui indeks pada Global Terorisme. Dalam GTI 2023 Indonesia berada pada posisi 24 dengan skor 5.502 (*medium impact of terrorism*) (Global Terrorism Index 2023, 2023), sedangkan dalam GTI 2024 Indonesia berada pada posisi 31 dengan skor 3.993 (*low impact of terrorism*) (Global Terrorism Index 2024, 2024). Hal yang paling signifikan adalah *zero attacks* di Indonesia yang tentunya upaya penegakkan hukum juga berperan di dalamnya.

Upaya pelokalan RAN PE sudah dimulai sejak Perpres 7/2021 diundangkan, terutamanya mulai marak sejak tahun 2022 yang merupakan kerja sama pusat dan daerah dalam implementasi dan percepatan RAN PE. Dalam laporan RAN PE beberapa identifikasi capaian yaitu: (1) pemenuhan hak rasa aman; (2) kegiatan yang berhasil diimplementasikan oleh Kementerian/Lembaga; (3) meningkatnya koordinasi. Terkait pelokalan RAN PE, dalam laporan tersebut disampaikan (BNPT, 2023):

Adanya Rencana Aksi Daerah Pencegahan Ekstremisme Kekerasan yang mengarah pada Terorisme (RAD PE) memungkinkan terbentuknya forum multi-stakeholder di provinsi dan kabupaten/kota, salah satunya yang diinisiasi oleh INFID dengan kemitraan bersama Kemendagri dan Kesbangpol Provinsi, terutama Jawa Timur dan Jawa Barat. Saat ini terdapat 8 Provinsi dan 8 Kabupaten/kota yang memiliki RAD PE yaitu Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Aceh, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Lampung, Provinsi Banten, Kabupaten Lampung Tengah, Kota Surakarta, Kota Bandung, Kota Garut, Kabupaten Bandung, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Sukoharjo, dan Kabupaten Bogor.

Adapun tantangan yang dihadapi adalah pemahaman dan penilaian urgensi dari Pemerintah Daerah yang perlu ditingkatkan dan kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah dengan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) yang belum optimal (BNPT, 2023). Oleh karena itu, adanya kegiatan pelokalan tersebut menjadi amat relevan dalam menjawab tantangan ini. Kemendagri telah memberikan dukungan terkait dengan RAN PE melalui penerbitan surat edaran kepada Gubernur/Bupati/Walikota No.339/5267/SJ Tanggal 29 September 2021 dimana salah satu point pentingnya; Penganggaran pelaksanaan RAN PE mempedomani Permendagri tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

I-KHub BNPT, pada tahun 2024 menyelenggarakan kegiatan pelokalan pencegahan ekstremisme kekerasan di Provinsi Lampung dan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Dinamika yang cukup menarik di NTB yang belum memiliki RAD PE, sekalipun sudah memiliki kajian dan draft yang didorong dan advokasi oleh pemerhati gender.

Kegiatan di Lampung diselenggarakan pada tanggal 2-3 Mei 2024. Pertemuan dipimpin Kasubdit Kerja Sama Multilateral dan dihadiri oleh perwakilan Dit. Kewaspadaan Nasional Kemendagri, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) yang juga Pj. Bupati Kab. Tulang Bawang Barat, perwakilan Dit Regional dan Multilateral Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Sekretariat Bersama RAN PE, Bakesbangpol Provinsi Lampung, FKPT Lampung, serta OMS dari Gusdurian Lampung, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Lampung, dan Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII) Lampung. 3. Dari diskusi yang berkembang terdapat beberapa hal yang mengemuka dan teridentifikasi antara lain:

1. keaktifan daerah tingkat provinsi dan kabupaten yang Menyusun dan menjalankan RAD PE yaitu RAD PE Provinsi Lampung dan RAD PE Kabupaten Lampung Tengah. Hal ini diapresiasi oleh Kemendagri dan BNPT, terlebih lagi setelah Sekber RAN PE menerima informasi sebelumnya saat melakukan monitoring dan evaluasi di Kesbangpol Provinsi Lampung;
2. pengupdatean dan pemutakhiran RAD PE Lampung diperlukan karena sudah masuk tahun 2024 yaitu tahun terakhir RAN PE;
3. pendekatan kreatif yang dimiliki provinsi Lampung untuk menysasar kalangan anak muda melalui pembuatan game yang mengandung nilai kearifan lokal seperti game Jelajah Lampung Berjaya dan permainan digital melalui roblox.

Melalui kegiatan ini, Bakesbangpol dan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Lampung juga telah mendapatkan pelatihan penggunaan platform I-KHub dan mengunggah konten dalam rangka upaya pencegahan ekstremisme kekerasan di daerah serta dalam rangka penguatan implementasi RAD PE di Provinsi Lampung.

#### Kegiatan Pelokalan Pencegahan Ekestremisme Kekerasan di Prov. Lampung



Selanjutnya setelah Lampung adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang diselenggarakan pada tanggal pada tanggal 21-22 Mei 2024 di Lombok. Pertemuan dipimpin Kasubdit Kerja Sama Regional dan dihadiri oleh perwakilan Dit. Kewaspadaan Nasional Kemendagri, Kepala Bakesbangpol merangkap Ketua FKPT NTB, perwakilan Dit RM BNPT, Sekretariat Bersama RAN PE, Bakesbangpol Provinsi NTB, FKPT NTB, serta OMS dari perwakilan Pemerhati Kebijakan Publik, Bumi Mataram, Hipakad, Majelis Adat Sasak, dan Duta Damai NTB.

Hal yang menarik dalam pertemuan ini adalah dihadiri oleh Ketua Majelis Adat Sasak yang cukup aktif dan merupakan Sek. FKPT NTB. Dari diskusi yang berkembang terdapat beberapa hal yang mengemuka dan teridentifikasi antara lain:

1. proses penyusunan naskah akademik RAD PE NTB untuk memberikan informasi kepada peserta kegiatan bahwa penyusunan naskah tersebut disusun bersama para pemangku kepentingan di Provinsi NTB dan perwakilan organisasi masyarakat sipil;

2. Bakesbangpol dan FKPT Provinsi NTB juga telah mendapatkan pelatihan penggunaan platform I-KHub dan mengunggah konten dalam rangka upaya pencegahan ekstremisme kekerasan di daerah serta dalam rangka penguatan implementasi RAN PE di Provinsi NTB;
3. Draft RAD PE yang ada saat ini akan diteruskan untuk pengesahan karena pertemuan tersebut juga langsung mendiskusikan pengesahan dengan bertemu pemerintah daerah.

### Kegiatan Pelokalan Pencegahan Ekstremisme Kekerasan di Prov. NTB



### SOLUSI DAN LUARAN

Pelokalan RAN PE adalah dalam menjawab tantangan yang diidentifikasi oleh Sekber RAN PE. Dapat disimpulkan bahwa pelokalan RAN PE perlu memperhatikan prinsip-prinsip yang ada di RAN PE yaitu prinsip-prinsip hak asasi manusia; supremasi hukum dan keadilan; pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak; keamanan dan keselamatan; tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*); partisipasi dan pemangku kepentingan yang majemuk; serta kebhinekaan dan kearifan lokal. Hal ini untuk menunjang efektifitas pencegahan ekstremisme kekerasan itu sendiri sehingga tidak kontraproduktif. Luaran yang dihasilkan dalam kegiatan ini adalah berupa rekomendasi yang diberikan oleh I-KHub BNPT dan Sekber RAN PE kepada daerah untuk penyusunan dan pelaksanaan RAD PE kedepannya.

### KESIMPULAN

Kesimpulan pengabdian masyarakat dalam hal pelokalan RAN PE adalah bahwa pelaksanaan tersebut berjalan dengan baik. Peserta menjadi memiliki pengetahuan penerapan RAN PE di daerah dan penggunaan platform I-Khub. Penggunaan platform ini akan menjadi basis data bagi daerah dalam penentuan permasalahan untuk membuat aksinya karena platform tersebut diperangkati dengan kondisi geospasial.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih diucapkan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya khususnya Fakultas Hukum yang telah memberikan kesempatan dalam melakukan pengabdian ini. Selanjutnya, terima kasih kepada BNPT khususnya Kedeputusan Kerjasama Internasional, Sekber RAN PE, dan I-Khub yang sudah memberikan kesempatan dalam mendukung kegiatan Abdimas ini, sehingga dapat terlaksana dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amaritasari, I. P. (2018). The Indonesia's Urgency on Adopting New Approach on Comprehensive Prevention in Countering Terrorism Strategy: Lesson Learnt from the Mako Detention Facility's Riot and East Java Bombs. In *Jurnal Keamanan Nasional: Vol. IV* (Issue 1). <https://regional.kompas.com/read/2018/05/14/08104371/kapolri-pelaku-utama-BNPT>.
- BNPT. (2023). *Laporan RAN PE 2023*.
- Ellis, B. H., & Abdi, S. (2017). Building community resilience to violent extremism through genuine partnerships. *American Psychologist*, 72(3), 289–300. <https://doi.org/10.1037/amp0000065>
- Global Terrorism Index 2023*. (2023).
- Global Terrorism Index 2024*. (2024).
- Stephens, W., Sieckelinck, S., & Boutellier, H. (2021). Preventing Violent Extremism: A Review of the Literature. *Studies in Conflict and Terrorism*, 44(4), 346–361. <https://doi.org/10.1080/1057610X.2018.1543144>